

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)**
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)**
- 10.
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. **Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;**
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 99);
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 78);
 17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 65);
 18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
 19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 123);
 20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor);
 21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi perizinan dan non perizinan sebagai berikut:
- 1) Izin Pemanfaatan Ruang
 - 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Pendidikan
 - 3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Pendidikan
 - 4) Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Pendidikan
 - 5) Izin Pendidikan Khusus/Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat (Swasta)

- 6) Izin Operasional Pendidikan Non-formal
- 7) Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK Negeri
- 8) Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK yang diselenggara oleh masyarakat (swasta)
- 9) Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus-SLB/PKLNegeri
- 10) Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus-SLB/PKLNegeri yang di selenggarakan oleh masyarakat (Swasta)
- 11) Izin Penutupan Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK Negeri
- 12) Izin Penutupan Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK yang diselenggara oleh masyarakat (Swasta)
- 13) Izin Penutupan Satuan Pendidikan Khusus-SLB/PKLNegeri
- 14) Izin Penutupan Satuan Pendidikan Khusus-SLB/PKLNegeri yang di selenggarakan oleh masyarakat (Swasta)
- 15) Izin Pembukaan Unit Produksi SMK (BLUD)
- 16) Izin Operasional Sekolah Baru
- 17) Izin Pembukaan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMA-SMK
- 18) Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan SMA-SMK/PKLNegeri
- 19) Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMA-SMK/PKLNegeri
- 20) Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan
- 21) Rekomendasi Pembukaan Jurusan/Kompetensi Keahlian Baru pada Perguruan Tinggi
- 22) Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Kesehatan
- 23) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Kesehatan
- 24) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Kesehatan
- 25) Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Kesehatan
- 26) Izin Operasional Perusahaan Pemberantasan Serangga (Pest Control)
- 27) Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
- 28) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan
- 29) Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) (Cabang)
- 30) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B
- 31) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B
- 32) Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMA atau PMDN
- 33) Rekomendasi Operasional Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMA atau PMDN
- 34) Rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A
- 35) Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B
- 36) Peningkatan Kelas Rumah Sakit Kelas B
- 37) Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STR TTK)
- 38) Rekomendasi Pengakuan Pedagang Besar Farmasi
- 39) Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan
- 40) Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan Dokter Spesialis
- 41) Izin Pembangunan Jaringan Irigasi
- 42) Izin Pemanfaatan Jaringan Irigasi
- 43) Izin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Badan Usaha Sosial atau Perseorangan

- 44) Izin Perubahan dan/atau Pembongkaran Jaringan Irigasi
- 45) Izin Mendirikan Bangunan Lain di Dalam, di Atas atau Melintasi Saluran Irigasi
- 46) Izin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air
- 47) Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Ruang Sungai Mengubah Aliran atau Arus Sungai
- 48) Izin Pemanfaatan Bantaran dan Sepadan Sungai
- 49) Izin Pemanfaatan Bekas Sungai
- 50) Izin Pemanfaatan Sungai Sebagai Penyedia Tenaga Air
- 51) Izin Pemanfaatan Sungai Sebagai Prasarana Transportasi
- 52) Izin Pemanfaatan Sungai Sebagai Kawasan Hutan
- 53) Izin Pemanfaatan Sungai untuk Perikanan
- 54) Izin Pemanfaatan Ruang Daerah Genangan dan Sempadan Waduk
- 55) Izin Penggunaan atau Pemanfaatan Air Permukaan
- 56) Perpanjangan Izin Penggunaan atau Pemanfaatan Air Permukaan
- 57) Izin Pengambilan dan Pemanfaatan air laut yang digunakan di darat
- 58) Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan air laut yang digunakan di darat
- 59) Izin Pengusahaan Air sebagai media dan materi untuk kegiatan pembuangan air limbah ke sungai
- 60) Izin Galian/Pembongkaran Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Penempatan Bangunan/Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi
- 61) Izin Melintas pada Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Jangka Waktu Tertentu
- 62) Izin Melintas pada Jalan dan Jembatan Provinsi
- 63) Izin Prinsip (pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP)
- 64) Izin Lokasi (pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP)
- 65) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
- 66) Rekomendasi Melaksanakan Penelitian
- 67) Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
- 68) Surat Izin Taman Anak Sejahtera (TAS)
- 69) Surat Izin Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (SIK-UKS) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak atau Lanjut Usia
- 70) Surat Izin Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (SIK-UKS) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- 71) Rekomendasi Tenaga Kerja Asing di Bidang Sosial
- 72) Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah
- 73) Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Tenaga Kerja
- 74) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Tenaga Kerja
- 75) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Tenaga Kerja
- 76) Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Tenaga Kerja
- 77) Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh

- 78) Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ke Luar Negeri
- 79) Izin Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS - AKL)
- 80) Surat Izin Pemakaian Pesawat Uap
- 81) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP)
- 82) Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- 83) Izin Edar Pangan Olahan
- 84) Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi
- 85) Izin Lingkungan
- 86) Izin Pengumpulan Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala Provinsi
- 87) Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah Lintas Kabupaten/Kota
- 88) Rekomendasi Izin Pemanfaatan Limbah B3
- 89) Rekomendasi Izin Pengolahan Limbah B3
- 90) Rekomendasi Izin Penimbunan Limbah B3
- 91) Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut
- 92) Rekomendasi Izin Dumping
- 93) Rekomendasi Izin Reinjeksi ke dalam Formasi
- 94) Rekomendasi Izin Venting
- 95) Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Perhubungan Darat
- 96) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Perhubungan Darat
- 97) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Perhubungan Darat
- 98) Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Perhubungan Darat
- 99) Izin Operasi Angkutan TAKSI
- 100) Izin Prinsip Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)
- 101) Izin Trayek Perusahaan Angkutan Otobus Umum Antar Kota Dalam Propinsi
- 102) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
- 103) Kartu Pengawasan (KPS)
- 104) Surat Keterangan Plafond Kendaraan
- 105) Rekomendasi/Advis Trayek Antar Kota Antar Propinsi (RT-AKAP)
- 106) Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Perhubungan Laut
- 107) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Perhubungan Laut
- 108) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Perhubungan Laut
- 109) Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Perhubungan Laut
- 110) Izin Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Regional

- 111) Surat Izin Pengelolaan Dermaga Kepentingan Sendiri Yang Berlokasi Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional
- 112) Surat Izin Penetapan Batas-Batas Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional (SIPBLKDL)
- 113) Surat Izin Pertimbangan Teknis Untuk Penambahan dan/atau Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Regional
- 114) Surat Izin Usaha Pengusahaan Tally Mandiri (SIUPT)
- 115) Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)
- 116) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
- 117) Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)
- 118) Surat Izin Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Regional
- 119) Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
- 120) Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
- 121) Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPER)
- 122) Izin Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional
- 123) Izin Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Regional
- 124) Izin Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
- 125) Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
- 126) Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional
- 127) Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
- 128) Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam di Pelabuhan Pengumpan Regional
- 129) Izin Pengerukan di Pelabuhan Pengumpan Regional
- 130) Izin Reklamasi di Pelabuhan Pengumpan Regional
- 131) Izin Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
- 132) Izin Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
- 133) Izin Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
- 134) Izin Pengerukan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
- 135) Izin Reklamasi di Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
- 136) Izin Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
- 137) Izin Usaha Depo Peti Kemas
- 138) Izin Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal
- 139) Izin Penetapan Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota
- 140) Izin Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya
- 141) Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan

- 142) Surat Penetapan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Regional
- 143) Rekomendasi Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Internasional dan Nasional
- 144) Rekomendasi Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja (DLK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Internasional Hub, Internasional dan Nasional
- 145) Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat
- 146) Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
- 147) Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelayaran Rakyat Pada Trayek Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
- 148) Rekomendasi Penetapan Induk Pelabuhan Internasional dan Nasional
- 149) Rekomendasi Penetapan Pelabuhan Internasional Hub, Internasional dan Nasional
- 150) Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus
- 151) Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Lintas Provinsi dan Antar Negara
- 152) Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan
- 153) Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpul
- 154) Rekomendasi Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) di Pelabuhan Pengumpul
- 155) Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional
- 156) Rekomendasi Penetapan Pelabuhan yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri di Pelabuhan Pengumpan Regional
- 157) Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus
- 158) Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional
- 159) Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Koperasi-UKM
- 160) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Koperasi-UKM
- 161) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Koperasi-UKM
- 162) Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Koperasi-UKM
- 163) Surat Izin Usaha Simpan Pinjam
- 164) Surat Izin Usaha Unit Simpan Pinjam
- 165) Surat Izin Pemakaian Aset Milik Pemerintah Aceh (Stadion Lhong Raya dan Hall Serbaguna Stadion Lhong Raya)
- 166) Surat Izin Pemakaian Aset Milik Pemerintah Aceh (Gedung Sosial, Taman Ratu Safiatuddin, dan Taman Budaya)
- 167) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- 168) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Penanaman Modal

- 169) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
- 170) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
- 171) Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Pariwisata
- 172) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Pariwisata
- 173) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Pariwisata
- 174) Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Pariwisata
- 175) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/Kota
- 176) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata (TDU-KP) Lintas Kabupaten/Kota
- 177) Tanda Daftar Usaha Perhotelan Berbintang 3 ke atas
- 178) Tanda Daftar Usaha Restoran
- 179) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Angkutan Wisata (antar kabupaten/kota dalam provinsi)
- 180) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE)
- 181) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta
- 182) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
- 183) Rekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji/Umrah
- 184) Rekomendasi Wisata Lansia
- 185) Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Perkebunan
- 186) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Perkebunan
- 187) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Perkebunan
- 188) Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Perkebunan
- 189) Izin Usaha Perkebunan (IUP)
- 190) Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
- 191) Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)
- 192) Izin Usaha Produksi Benih (IUP-b)
- 193) Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing)
- 194) Rekomendasi Perpanjangan HGU
- 195) Persetujuan Perubahan Luas Lahan
- 196) Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman
- 197) Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
- 198) Persetujuan Diversifikasi Jenis Usaha Perkebunan
- 199) Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Peternakan
- 200) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Peternakan
- 201) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Peternakan
- 202) Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Peternakan
- 203) Izin Pemasukan DOC dan DOD
- 204) Izin Rumah Potong Hewan
- 205) Izin Rumah Potong Unggas
- 206) Izin Usaha Obat Hewan
- 207) Izin Usaha Peternakan
- 208) Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Serta Bahan Asal Hewan Ternak dari dan ke Aceh

- 209) Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan
- 210) Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran dan Pemasukan Ternak serta Bahan Asal Hewan Ternak dari dan ke Aceh
- 211) Surat Keterangan Jalan Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Serta Bahan Asal Hewan Ternak dari dan ke Aceh
- 212) Perjanjian Usaha Kemitraan Usaha Peternakan
- 213) Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Kehutanan
- 214) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Kehutanan
- 215) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Kehutanan
- 216) Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Kehutanan
- 217) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
- 218) Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
- 219) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
- 220) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- 221) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan (IUPHHKHKm)
- 222) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat/ Hutan Gampong (IUPHHK-HTR/HG)
- 223) Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR)
- 224) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK)
- 225) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- 226) Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) pada Taman Hutan Raya
- 227) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE)
- 228) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman/ Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT/HTI)
- 229) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK)
- 230) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)
- 231) Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) atau Energi Air (IUPEA)
- 232) Izin Pengelolaan Hutan Gampong (IPHG)
- 233) Rekomendasi Izin - Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat di Bidang Kehutanan
- 234) Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Energi & Ketenagalistrikan
- 235) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Energi & Ketenagalistrikan
- 236) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Energi & Ketenagalistrikan
- 237) Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Energi & Ketenagalistrikan
- 238) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (dalam provinsi)
- 239) Izin Operasi (penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri)
- 240) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

- 241) Rekomendasi Wilayah Usaha Kelistrikan
- 242) Rekomendasi Usaha Kelistrikan
- 243) Surat Izin Pengeboran Air Tanah (SIP)
- 244) Surat Izin Pemakaian dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)
- 245) Perpanjangan Surat Izin Pemakaian dan Pemanfaatan Air Tanah
- 246) Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Mineral & Batubara
- 247) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Mineral & Batubara
- 248) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Mineral & Batubara
- 249) Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Mineral & Batubara
- 250) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan
- 251) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan
- 252) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan
- 253) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara
- 254) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara
- 255) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara
- 256) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara
- 257) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam
- 258) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam
- 259) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam
- 260) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam
- 261) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral non Logam
- 262) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral non Logam
- 263) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral non Logam
- 264) Izin Ekspor Produk Pertambangan Mineral Logam, Mineral Non Logam, Batuan dan Batubara
- 265) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian di Pertambangan Mineral
- 266) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan
- 267) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan
- 268) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan
- 269) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara.
- 270) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara.

- 271) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian mineral logam
- 272) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian Non Logam, Batuan dan Batubara
- 273) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral non Logam
- 274) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral non Logam
- 275) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Non Logam jenis tertentu
- 276) Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan
- 277) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan
- 278) Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian
- 279) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan
- 280) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan
- 281) Izin Pertambangan Rakyat
- 282) Izin Pendirian Gudang Bahan Peledak
- 283) Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan
- 284) Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMA Menjadi Perusahaan PMDN
- 285) Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMDN Menjadi Perusahaan PMA
- 286) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
- 287) Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris
- 288) Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham
- 289) Pengusahaan Jasa Pertambangan
- 290) Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Khusus
- 291) Persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
- 292) Persetujuan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan (Supensi)
- 293) Persetujuan Ralat Batas dan Luas Pertambangan
- 294) Izin Prinsip Pendirian SPBU
- 295) Izin Prinsip Pendirian SPPBE
- 296) Izin Prinsip Pendirian SPBI
- 297) Izin Prinsip Pendirian SPBN
- 298) Izin Prinsip Pendirian SPBA (TNI)
- 299) Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM pada SPBU
- 300) Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBG pada SPPBE
- 301) Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM pada SPBI
- 302) Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM pada SPBN
- 303) Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM pada SPBA (TNI)
- 304) Izin Agen LPG
- 305) Izin Pangkalan LPG
- 306) Rekomendasi Pengelolaan Sumur Tua
- 307) Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Migas

- 308) Rekomendasi Pengolahan Kilang Minyak Bumi Berkapasitas Produksi > 5000 barel/hari
- 309) Rekomendasi Pengolahan Kilang Gas Bumi (LPG) Berkapasitas Produksi > 5000 ton/tahun
- 310) Rekomendasi Pengolahan Kilang LNG Berkapasitas Produksi > 40.000 ton/tahun
- 311) Rekomendasi Pengangkutan Minyak Bumi Lintas Provinsi
- 312) Rekomendasi Pengangkutan BBM Lintas Provinsi
- 313) Rekomendasi Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Lintas Provinsi
- 314) Rekomendasi Pengangkutan LPG Lintas Provinsi
- 315) Rekomendasi Pengangkutan CNG Lintas Provinsi
- 316) Rekomendasi Pengangkutan LNG Lintas Provinsi
- 317) Rekomendasi Pengangkutan Hasil Olahan Lintas Provinsi
- 318) Rekomendasi Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi Kapasitas > 1000 kiloliter/tangki
- 319) Rekomendasi Fasilitas Penyimpanan BBM Kapasitas > 1000 Kiloliter/tangki
- 320) Rekomendasi Fasilitas Penyimpanan LPG Kapasitas > 200 Metric Ton/tangki
- 321) Rekomendasi Fasilitas Penyimpanan BBM Kapasitas > 10 juta standar kaki kubik/hari (MMSCFD)
- 322) Rekomendasi Niaga Minyak Bumi Lintas Provinsi
- 323) Rekomendasi Niaga BBM Lintas Provinsi
- 324) Rekomendasi Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Lintas Provinsi
- 325) Rekomendasi Niaga LPG Lintas Provinsi
- 326) Rekomendasi Niaga CNG Lintas Provinsi
- 327) Rekomendasi Niaga LNG Lintas Provinsi
- 328) Rekomendasi Niaga Hasil Olahan Lintas Provinsi
- 329) Rekomendasi Niaga Bio Fuel Kapasitas > 10.000 kiloliter/tahun
- 330) Rekomendasi Perdagangan
- 331) Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
- 332) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
- 333) Rekomendasi Impor
- 334) Surat Persetujuan Ekspor Kopi
- 335) Surat Keterangan Asal (SKA)
- 336) Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Perindustrian
- 337) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Perindustrian
- 338) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Perindustrian
- 339) Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Perindustrian
- 340) Izin Usaha Industri (IUI)
- 341) Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahapan Persetujuan Prinsip
- 342) Izin Perluasan Usaha Industri

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua merupakan pedoman bagi setiap pelaksana pekerjaan dalam menjalani tugas pokok

dan fungsi sesuai dengan tingkatan unit organisasi masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal _____ 2021 M
1441 H

an.GUBERNUR ACEH,
SEKRETARIS DAERAH

TAQWALLAH

DRAFT